

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino,(2016) *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Mater dan Van Horn*, diakses pada tanggal 2 Sepetmber 2020, hlm. 21
- Akmalia, (2024). *Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Dengan Menggunakan Metode Servqual dan Metode Triz. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara*. Universitas Malikussaleh
- Anggara, Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: CV.Pustaka Setia
- Anggara, G. C. E. III. (2014). *Implementasi Kebijakan dalam Konteks E-Government: Model Konseptual dan Pendekatan Praktis* (hal, 248)
- Berlian, A. P. (2023). *Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Booz, Allen, & Hamilton. 2001. *E-government yang Berimbang: E-government yang Menghubungkan Administrasi yang Efisien dan Demokrasi yang Responsif*, Gütersloh , Jerman, Bertelsmann Foundation Publishing House
- Cohen, J.M, dan N.T. Uphoff. 1977. *Partisipasi Pembangunan Pedesaan*. New York: Ithaca.
- Djabbari, H. M (2024). *Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa Tondowolio Kabupaten Kolaka*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Edward III, George C. 2002. *Model Pendekatan Implementasi*. Congresinal: Quartely Press.
- Elysia, V., & Ake Wihadanto, S. (2017). *Implementasi E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintegrasi di Indonesia*. Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Smart City, 353–380.
- Fulthoni, F., dkk. (2009). Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Publik. Jakarta: Prenadamedia Group
- Heeks, R. (2001). *Memahami E-Governance untuk Pembangunan* (Government Working Paper No. 11). Institut untuk Kebijakan dan Manajemen Pembangunan, Universitas Manchester.
- Herawati, A. R., & Kismartini. (2022). *Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak)*. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, 4(3), 203–208

- Hiplunudin, A. (2017). *Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Indrajit, R.E. (2007). *E-government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Irawan, B. (2017). *Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Paradigma, 2(1), 174–201.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2: 1.
- Miles M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis data Kualitatif Sumber Utama yang Diperluas* (Edisi ke-2). Thousand Oaks, CA : Sage Publications.
- Mayestika Fortuna Jaharuddin (2023). *Analisis Penerapan E-Government dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone*. Universitas Hasanuddin
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada
- Nugroho, R. (2009). Jakarta: Implementasi Kebijakan Publik. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Memperkuat Tata Kelola Berbasis Elektronik di Indonesia.
- Perturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.
- Prasetyawan, A. J. (2022). *Implementasi Pemanfaatan Egovernment Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 7(1).
- Kurniati, S. P (2023). *Implementasi Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kota Bandung*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 9(4), 875–886.
- Sahya, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Cv Pustaka Setia.

Setiawan, Iwan., “*Pengelolaan E-Goverment Oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas*” Jurnal Administrasi Publik,

Sudrajat C, R & Setyowati, E (2023). *Efektivitas Penyelenggaraan E-Government Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 12

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabet

Sutopo. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. UNS.

Tui, L., Zhang, H., & Wang, Y. (2022). Indikator Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik Berbasis Society 5.0. Jurnal Teknologi dan Inovasi, 15(3), 255-263

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan.

Wahab, S. A. (2005). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2006. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.